

CO-MANAGEMENT UNTUK MENGINISIASI PENYELESAIAN KONFLIK DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU

Co-management May Initiate Conflict Solving at Lore Lindu National Park

Saharia Kassa¹⁾, Hadi S. Alikodra²⁾, Bunasor Sanim³⁾, Sambas Basuni²⁾

¹⁾ Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta Km 5 Palu 94118, Sulawesi Tengah Telp./Fax : 0451-429738. E-mail : saharika_kassa@yahoo.com

²⁾ Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. ³⁾ Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

ABSTRACT

The research aims were to analyze stakeholder interests in affecting conflict at Lore Lindu National Park, and to analyze the key factor determining in the success of co-management as an approach in Lore Lindu National Park management. The village sample determination was conducted using a Stratified Random Sampling method, while 90 local community respondents were determined using a Systematic Random Sampling method, in which 45 people were taken from villages where the conservation community agreement (KKM Villages) has been established and the other 45 people from villages where there was no conservation community agreement (Non-KKM villages). There were 6 respondents from the Lore Lindu National Park Authority (BTNLL), 3 respondents from non-governmental organization (NGO), and 6 respondents were researcher/academicians determined using the Purposive Sampling method. The results of the study showed that the stakeholder interests affecting conflict at the Lore Lindu National Park were custom land uses within the Park area, boundary pole reconstruction, rattan extraction, illegal logging, and protected wildlife hunting. In addition, the key factors determining the co-management success were stakeholder involvement, negotiation, territory boundary, consensus, clarity of right and responsibility, local community right recognition, and applying the custom punishment.

Keywords: Co-management, conflict, National Park.

PENDAHULUAN

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) seluas 217.991,18 ha yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 tanggal 5 Oktober 1993 cenderung mengalami kerusakan akibat dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang terjadi di sekitar TNLL terutama diakibatkan oleh; 1) desakan kebutuhan lahan, baik untuk kegiatan pertanian sebagai sumber penghidupan maupun untuk pemukiman, 2) masyarakat merasa bahwa kawasan TNLL tidak memberikan manfaat bagi kelangsungan

hidup mereka, dan 3) proses penetapan batas kawasan yang dilakukan sepihak tanpa penjelasan memadai kepada masyarakat yang telah memanfaatkan sumberdaya yang terdapat pada kawasan ini jauh sebelumnya (Khaeruddin *et. al.* 2002).

Dalam upaya mengatasi masalah dan mengantisipasi kerusakan TNLL, dibutuhkan suatu konsep pengelolaan yang diharapkan dapat mengakomodir aspirasi dan keinginan dari semua stakeholder. Konsep yang dimaksud pada intinya dibangun atas dasar partisipasi, komitmen, dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang dikenal dengan

pendekatan *co-management*. Pengelolaan dengan pendekatan *co-management* bertujuan sebagai solusi untuk penyelesaian konflik tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan. Oleh sebab itu untuk melindungi dan melestarikan TNLL sekaligus diharapkan dapat meminimalisir konflik kepentingan, maka diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk: 1) Menganalisis kepentingan stakeholder dalam kaitannya dengan konflik kepentingan yang terjadi di taman nasional. 2) Menganalisis faktor kunci penentu keberhasilan *co-management* untuk pengelolaan TNLL.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di enam desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Propinsi Sulawesi Tengah. Penelitian berlangsung dari Nopember 2006 sampai dengan Agustus 2007.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan diskusi pakar. Metode wawancara ditujukan pada pertanyaan penelitian tentang kepentingan stakeholder yang terkait dengan konflik yang terjadi di sekitar taman nasional dengan melibatkan 90 orang masyarakat lokal dan 6 orang BTNLL sebagai responden. Diskusi pakar dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting penentu keberhasilan *co-management* dengan melibatkan staf BTNLL 3 orang, LSM 3 orang, dan akademisi atau peneliti 6 orang.

Desa yang dijadikan sampel dipilih secara *Stratified Random Sampling* sebanyak 6 desa yang terdiri dari 3 desa yang telah memiliki kesepakatan konservasi (Desa KKM) dan 3 desa yang belum memiliki kesepakatan konservasi (Desa Non-KKM). Masyarakat lokal yang dijadikan sampel sebanyak 90 orang yang bermukim di desa sampel dan 15 orang stakeholder lainnya. Responden masyarakat lokal diambil secara *Systematic Random Sampling* sebanyak

45 orang dari Desa KKM yakni: Desa Toro, Desa Doda, dan Desa Wuasa masing-masing 15 responden, serta 45 orang dari Desa Non-KKM yakni: Desa Kadidia, Desa Rahmat, dan Desa Tuva masing-masing 15 responden. Sementara 15 orang *stakeholder* lainnya terdiri atas: 6 orang pihak BTNLL, 3 orang LSM, dan 6 orang akademisi/peneliti ditentukan secara *Purposive Sampling* (Teguh 2001).

Kepentingan stakeholder yang terlibat di TNLL dianalisis dengan mengacu pada Grimble, R. & Man-Kwan Chan (1995) untuk menentukan kepentingan masing-masing stakeholder yang diharapkan dari kegiatan pengelolaan TNLL. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor kunci penentu keberhasilan *co-management* sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan taman nasional dilakukan analisis prospektif (Diadaptasi dari Byl *et al.* 2002; Hardjomidjoyo 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Stakeholder

Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal di sekitar TNLL merupakan stakeholder utama dengan kepentingan yang berbeda terhadap taman nasional dibandingkan dengan stakeholder BTNLL selaku otoritas TNLL. Kepentingan masyarakat lokal terhadap lahan adat (kebun masyarakat dalam kawasan) yang telah dikelola sebelum penetapan kawasan, menimbulkan konflik dengan pihak BTNLL yang menginginkan agar masyarakat lokal tidak berkebun di dalam kawasan taman nasional. Kepentingan masyarakat yang ada pada Desa KKM dan Desa Non-KKM terkait dengan TNLL ditunjukkan pada Gambar 1.

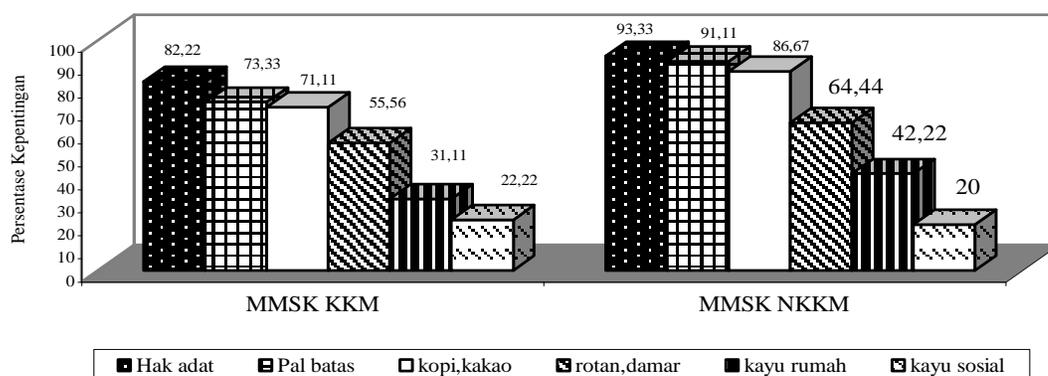
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa pilihan kepentingan masyarakat lokal yang ada di sekitar TNLL untuk tetap mempertahankan hak adat/hak kelola dari lahan yang terdapat di dalam taman nasional memperlihatkan persentase tertinggi dibanding kepentingan lainnya. Hal ini berindikasi

bahwa kepentingan utama dari masyarakat lokal adalah pemanfaatan lahan adat mereka yang berada di dalam kawasan taman nasional yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka secara turun temurun baik pada kelompok Desa KKM maupun pada Desa Non-KKM. Kepentingan akan lahan adat tersebut di Desa KKM telah terakomodir melalui kesepakatan yang dibangun dan disetujui oleh pihak BTNLL, akan tetapi pada Desa Non-KKM masih berkisar pada keinginan untuk memperjelas status kepemilikan lahan atau sumberdaya yang ada dalam kawasan taman nasional.

Ketidak jelasan status lahan yang telah diolah oleh masyarakat lokal di Desa Non-KKM sebelum penetapan kawasan, memberikan dampak ketidak nyaman dalam pemanfaatan sumberdaya yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ketidak nyaman masyarakat lokal

dirasakan sejak adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts-II/1993 pada tanggal 5 Oktober 1993 tentang penunjukan kawasan TNLL yang pada saat itu mulai pemberlakukan aturan yang melarang masyarakat lokal untuk mengambil atau memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan tanaman nasional. Pemberlakuan aturan ini didukung pula Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan keluarnya SK Gubernur No.592/1993 tentang tidak diakuinya keberadaan lahan adat di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan yang melarang masyarakat lokal untuk tidak lagi melakukan kegiatan di dalam kawasan TNLL, membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan ketidak nyaman tersebut diungkapkan oleh masyarakat di Desa Non-KKM yang ditunjukkan pada Tabel 1.



Keterangan: MMSK KKM = Masyarakat yang memilih sebagai kepentingan di Desa KKM.
MMSK NKKM = Masyarakat yang memilih sebagai kepentingan di Desa Non-KKM.

Gambar 1. Persentase Kepentingan Masyarakat Lokal di Desa KKM dan Desa Non-KKM 2007.

Tabel 1. Jumlah dan Alasan Responden Masyarakat Lokal di Desa Non-KKM yang Merasakan Ketidak Nyamanan Terkait Dengan Sumberdaya yang Terdapat di Dalam TNLL 2007

No.	Alasan yang dikemukakan	Jumlah dan persentase responden	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Takut tanaman kopi/kakaonya ditebang oleh polisi hutan	25	55,56
2.	Takut kalau rotan yang diambil dipotong-potong oleh polisi hutan	12	26,67
3.	Takut ditangkap oleh polisi hutan	8	17,77
Total		45	100,00

Sumber: Data Primer setelah diolah 2007.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketidaknyamanan yang paling dirasakan oleh masyarakat lokal yang ada di Desa Non-KKM dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di dalam kawasan TNLL adalah masyarakat merasa tidak aman karena takut tanaman kopi/kakaonya ditebang oleh polisi hutan (55,56%) dan 26,67% dari responden yang merasa tidak aman sebab takut kalau rotan yang diambil dipotong-potong atau dicincang oleh polisi hutan. Selain itu masyarakat lokal merasa takut karena jangan sampai tertangkap oleh polisi hutan. Kondisi ini berlangsung kurang lebih 5 tahun (sejak 1993) sampai akhirnya masyarakat mulai melakukan perlawanan pada 1998 (zaman reformasi). Masyarakat yang bermukim di Desa Non-KKM melakukan perlawanan terhadap tindakan polisi hutan yang selain menebang tanaman kopi/kakao masyarakat, juga membakar dangau milik masyarakat. Bentuk perlawanan lainnya yang dikenal dengan konflik di Desa Non-KKM adalah masyarakat membakar dua unit pos penjagaan polisi hutan dan selanjutnya sebanyak 1.030 KK masyarakat masuk ke dalam kawasan taman nasional menebang kayu, berkebun, dan sekaligus bermukim di dalam kawasan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan polisi hutan (pihak BTNLL) di Desa Non-KKM lebih diakibatkan karena perbedaan kepentingan dan perbedaanakuan hak kepemilikan dimana masyarakat lokal merasa bahwa lahan yang terdapat di dalam kawasan TNLL yang dimanfaatkan masyarakat selama ini merupakan hak adat/hak kelola masyarakat yang telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat secara turun temurun. Disisi lain pihak BTNLL melalui polisi hutan merasa memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan kawasan TNLL. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fisher (2000) bahwa ada lima penyebab utama terjadinya konflik diantaranya adalah kepentingan, sementara Tadjudin (2000)

berpendapat pula bahwa sumber konflik karena adanya perbedaan pada berbagai tataran diantaranya adalah perbedaan kepentingan dan perbedaanakuan kepemilikan. Kemudian Fuad dan Maskanah (2000) mengemukakan bahwa konflik yang mencuat akhir-akhir ini lebih disebabkan karena tumpang tindihnya kepentingan pada suatu wilayah hutan yang sama.

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa baik di desa KKM maupun di desa Non-KKM, selain masyarakat menginginkan pengakuan pemanfaatan lahan adat yang ada di dalam kawasan, mereka juga menginginkan penataan kembali pal batas TNLL, tetap dapat mengambil rotan sebagai sumber pendapatan, dan memanfaatkan kayu untuk keperluan rumah tinggal dan sarana sosial seperti rumah ibadah, *lobo* dan *bantaya*. Dengan adanya KKM, sebagian keinginan masyarakat tersebut, di antaranya pengambilan kayu untuk bahan bangunan rumah tinggal dan atau sarana sosial telah terakomodir dan tertuang dalam naskah Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), meskipun harus dengan seizin lembaga adat. Sementara di desa Non-KKM, ada kecenderungan keinginan masyarakat akan hal tersebut di atas lebih tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh belum adanya kesepakatan yang dapat mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal pemanfaatan sumberdaya di kawasan taman nasional.

Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL)

BTNLL sebagai otoritas pengelolaan taman nasional belum efektif dalam mengelola TNLL. Ketidakefektifan pengelolaan ini ditandai dengan kerusakan TNLL cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara masyarakat yang hidup di sekitar taman nasional sebagian besar masih berpendapatan rendah. Oleh sebab itu hal-hal penting yang diharapkan oleh BTNLL terkait dengan pengelolaan kawasan TNLL ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hal penting yang diharapkan oleh BTNLL terkait dengan pengelolaan taman nasional adalah selain melaksanakan tugas sebagai otoritas taman nasional, juga berkepentingan mempertahankan kawasan TNLL sebagai wilayah konservasi, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu pihak BTNLL juga berkepentingan untuk mengajak masyarakat lokal agar tidak lagi melakukan kegiatan *illegal logging*, juga mengharapkan agar masyarakat tidak memperluas kebun di dalam kawasan taman nasional.

BTNLL juga mengharapkan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar TNLL untuk tidak menghilangkan pal batas taman nasional berupa pal beton. Harapan lainnya yang tidak kalah pentingnya menurut stakeholder BTNLL adalah sumber dana yang digunakan dalam pengelolaan daerah penyangga seyogyanya bukan dana pinjaman melainkan dana hibah yang penggunaannya

dikoordinasikan dengan BTNLL agar penggunaan dana dapat lebih efektif. Namun, selama ini sejumlah dana yang digunakan dalam implementasi proyek konservasi dan pembangunan bagi daerah penyangga di sekitar TNLL belum dikoordinasikan kepada pihak BTNLL. Indikator yang dapat dilihat dari adanya koordinasi yang belum jalan antara lain bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda Propinsi untuk pembangunan daerah penyangga pada saat dikonfirmasi dengan Kepala Balai TNLL, ternyata bahwa informasi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut belum banyak diketahui oleh pihak BTNLL. Kondisi tersebut dapat merupakan salah satu indikator bahwa pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan TNLL belum dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang pada akhirnya memunculkan konflik diantara stakeholder TNLL.

Tabel 2. Beberapa Hal Penting yang Diharapkan Oleh Stakeholder BTNLL Terkait Dengan Pengelolaan TNLL 2007

No.	Kepentingan Stakeholder	Persentase Jumlah Stakeholder BTNLL Berdasarkan Pilihan Kepentingan (%)		Total (%)
		BTNLLMSK	BTNLLYTP	
1.	Melaksanakan tugas sebagai otoritas taman nasional	83,33	16,67	100,00
2.	Mempertahankan kawasan TNLL sebagai kawasan konservasi	83,33	16,67	100,00
3.	Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati	83,33	16,67	100,00
4.	Mempertahankan pal batas	83,33	16,67	100,00
5.	Masyarakat tidak melakukan kegiatan <i>illegal logging</i>	83,33	16,67	100,00
6.	Masyarakat tidak memperluas kebun dalam kawasan	83,33	16,67	100,00
7.	Masyarakat tidak melakukan penangkapan satwa yang dilindungi diantaranya anoa, rusa, dan babi rusa	83,33	16,67	100,00
8.	Dana yang digunakan dalam pengelolaan daerah penyangga merupakan dana hibah yang penggunaannya dikoordinasikan dengan pihak BTNLL	50,00	50,00	100,00
Rata-rata		77,91	22,09	100,00

Keterangan: - BTNLLMSK = BTNLL yang memilih sebagai suatu kepentingan
 - BTNLLYTP = BTNLL yang tidak memberikan pilihan.

Terkait dengan kepentingan dari kelompok stakeholder yang telah diuraikan maka dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di kawasan TNLL terutama diakibatkan oleh adanya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan lahan adat, pal batas taman nasional, illegal logging, pengambilan rotan dalam kawasan, dan perburuan satwa yang dilindungi.

Faktor Kunci Keberhasilan *Co-management*

Faktor kunci yang menentukan keberhasilan *co-management* sebagai suatu pendekatan pengelolaan yang diharapkan dapat menginisiasi penyelesaian konflik kepentingan stakeholders di TNLL, ditentukan dengan analisis prospektif yang hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2.

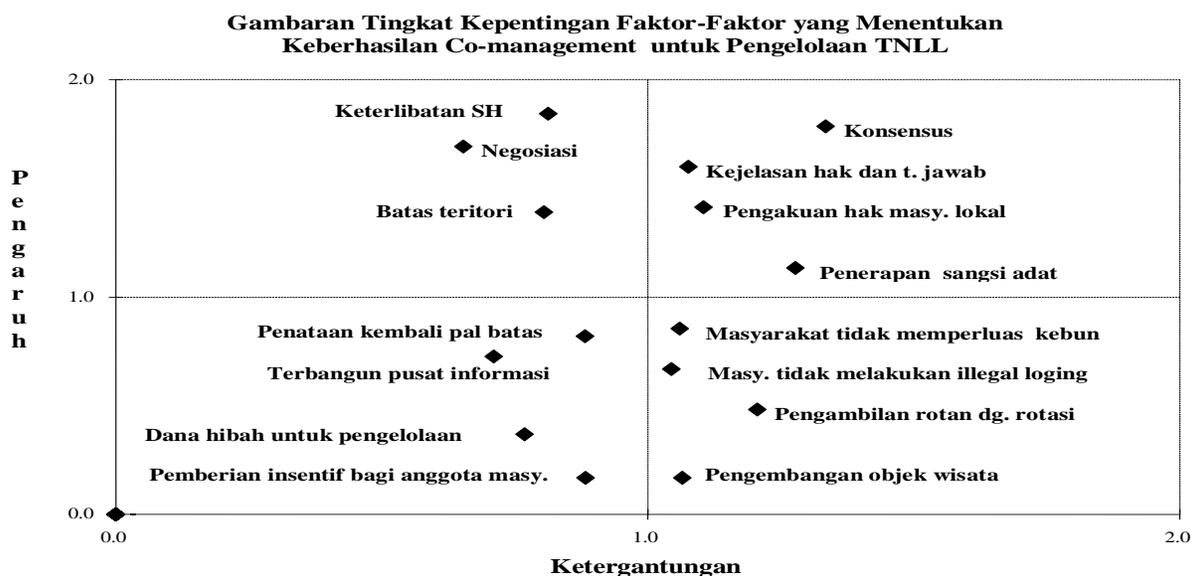
Berdasarkan hasil analisis pada Gambar 2 terlihat bahwa ada tujuh faktor kunci keberhasilan *co-management* dalam pengelolaan TNLL, yang terdapat pada kuadran I dan kuadran II yakni : keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan taman nasional, ada proses negosiasi, ada batas teritori, ada konsensus yang disepakati, kejelasan hak dan tanggung jawab stakeholder,

pengakuan terhadap hak masyarakat lokal, serta penerapan sanksi adat. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fisher (1995); Claridge & O’Callaghan (1995); IUCN (1994); Borrini-Feyerabend *et.al* (2000) mengemukakan beberapa prinsip dasar atau karakteristik dari keberhasilan *co-management* termasuk tujuh faktor kunci penentu keberhasilan *co-management* untuk pengelolaan TNLL.

KESIMPULAN

Kepentingan utama stakeholder yang mengakibatkan terjadinya konflik di TNLL adalah pemanfaatan lahan adat yang terdapat di dalam kawasan taman nasional, keinginan untuk rekonstruksi pal batas, pengambilan rotan dalam kawasan, kegiatan *illegal logging*, dan perburuan satwa yang dilindungi.

Faktor kunci penentu keberhasilan *co-management* yakni: keterlibatan stakeholder, negosiasi, kejelasan batas teritori, konsensus, kejelasan hak dan tanggungjawab stakeholder, pengakuan hak masyarakat lokal oleh BTNLL, dan penerapan sanksi adat.



Gambar 2. Tingkat Kepentingan Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Pengembangan *Co-management* Dalam Pengelolaan TNLL.

DAFTAR PUSTAKA

- Byl R, Trainmar, Guadeloupe. 2002. *Strategic Planning Using Scenario*. Paper to be Presented at IAME 2002 Conference. Panama City. Panama.
- Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguingiri JC, Ndangang VA. 2000. *Co-management of Natural resources: Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing*. GTZ Germany.
- Claridge G, O'Callaghan, 1995. *Community Involment in Wetland Management: Lessons from the Field. Incorporating the Proceedings of Workshop 3: Wetlands, Local People and Development, of the International Conference on Wetlands and Development held in Kuala Lumpur*. Malaysia.
- Fisher, R.J. 1995. *Collaborative Management of Forest for Conservation and Development*. Issues in Forest Conservation. IUCN-The World Conservation Union, World Wide Fund for Nature, Valserine-France.
- Fisher. 2000. <http://jepits.wordpress.com>. *Manajemen Konflik Definisi dan Teori- teori Konflik/ jepits world wide community.mht*.
- Fuad FH, Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor : Pustaka Latin.
- Grimble R, Chan MK. 1995. *Stakeholder Analysis for Natural Resource Management in Developing Countries: Some Practical Guidelines for Making Management More Participatory and Effective*. Natural Resources Forum. 19(2): 274-293.
- Hardjomidjoyo H. 2002. *Panduan Lokakarya Analisis Prospektif*. Fakultas Pertanian, Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- IUCN. 1994. *Guidelines for Protected Area Management Categories*. WCMC-IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK.
- Khaeruddin I et al. 2002. *Kesepakatan Konservasi Masyarakat di Lima Desa Sekitar Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*. The Nature Conservancy-Lore Lindu Field Office. Palu.
- Tadjudin D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor : Pustaka Latin
- Teguh M. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.